

INSPEKTORAT KOTA JAMBI



**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023**

INSPEKTORAT KOTA JAMBI



Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru Jambi-36128

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Jambi secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kota Jambi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kerjanya.

Jambi,

2022

**INSPEKTUR,**
YUNITA INDRAWATI, AP, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	22
BAB V PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	12
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	16
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Inspektorat Kota Jambi	20
Tabel 3.2	Tujuan Inspektorat Kota Jambi	21
Tabel 3.3	Sasaran Inspektorat Kota Jambi	21
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi	21
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	23
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	24

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Jambi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Jambi mengusulkan anggaran pada APBD Kota Jambi di Tahun 2023 untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp.13.549.589.520,00 yang terdiri atas 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Jambi dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6 01		INSPEKTORAT DAERAH								
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	-LEVEL 3 - 3,45		B		96%	100%	9,500,865,418	103.01%
01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	84.50		0	-		100%	648,000	0.68%
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		0	-		100%	648,000	1.03%
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		0	-		100%	-	0.00%
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		100%	100%	100%	100%	6,922,489,023	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan		60 orang	60 orang	100%	100%	6,615,910,023	
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		7 orang	7 orang	100%	100%	306,579,000	37.40%
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%		100%	100%	100%	100%	45,332,000	

6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		6 orang	6 orang	100%	100%	45,332,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.11		100%	74%	74%	100%	217,134,000	16.38%
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-		70 stell	70 stell	100%	100%	84,302,000	38.49%
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 orang		5 kali	2 kali	40%	100%	12,290,000	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 orang		12 kali	12 kali	100%	100%	29,972,000	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		52 kali	30 Kali	58%	100%	90,570,000	8.18%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%		100%	100%	100%	100%	630,196,318	18.61%
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		10 jenis	8 jenis	100%	100%	8,055,610	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		43 jenis	43 jenis	100%	100%	246,236,975	27.60%
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket		18 jenis	18 jenis	100%	100%	10,033,800	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		21 jenis	21 jenis	100%	100%	67,831,830	

6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan		820 buah	200 buah	100%	100%	26,026,200	109.59%
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		80 kali	80 kali	100%	100%	272,011,903	11.01%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%		100%	100%	100%	100%	554,957,000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		2 unit	2 unit	100%	100%	496,000,000	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit		6 jenis	6 jenis	100%	100%	19,690,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit		6 jenis	4 jenis	100%	100%	39,267,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	542,355,102	30.09%
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		600 surat	150 surat	100%	100%	11,286,800	14.31%
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh	10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh	100%	100%	197,880,602	29.38%
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		10 orang	10 orang	100%	100%	333,187,700	31.73%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik	5%		100%	100%	100%	100%	587,753,975	32.78%
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit		26 unit	26 unit	100%	100%	373,548,175	29.42%

6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit		51 unit	20 unit	100%	100%	28,102,300	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 paket	1 paket	100%	100%	169,411,500	32.37%
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 gedung	1 gedung	100%	100%	16,692,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)	6.89		70%	99%	99%	100%	4,336,750,000	4020.00%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	20%		100%	102%	102%	100%	3,813,925,000	40.24%
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 laporan		16 laporan	16 laporan	100%	100%	344,850,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154 laporan		297 laporan	329 Laporan	111%	100%	2,561,750,000	34.14%
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 laporan		40 laporan	40 laporan	100%	100%	36,350,000	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 laporan		40 laporan	40 laporan	100%	100%	43,625,000	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		12 laporan	12 laporan	100%	100%	170,400,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 dokumen		28 laporan	8 laporan	100%	100%	656,950,000	33.30%

6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%		100%	95%	95%	100%	522,825,000	39.90%
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 laporan		21 laporan	20 laporan	95%	100%	522,825,000	39.90%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3		70%	86%	86%	100%	284,825,000	21.78%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	70		100%	86%	86%	100%	284,825,000	21.78%
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 PD					100%	-	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 PD		2 laporan	2 laporan	100%	100%	161,825,000	12.37%
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24 kegiatan		24 laporan	16 laporan	71%	100%	123,000,000	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 PD			0		100%	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi**

No	Indikator	Target Renstra PD (Setelah Perubahan)					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	75%	80%	90%	100%	100%	89,53%	90,24%	95%	97%	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	5,6	6	6,2	6,4	6,89	6,2	6,2*	6,3	6,8	*) Hasil penilaian tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,25	3,5	3	3	3	2,893	3	3	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	1	2	0	0	0	0	0	0	Mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi indikator pencapaian kinerja
5	Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan PD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada PD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala PD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala PD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala PD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a. Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang kompeten maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara profesional.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas
 - c. Kurangnya kesadaran perangkat daerah/objek pemeriksaan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
 - a. Tantangan
Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada

pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance.

2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Renstra. Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH, NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	B, 84,50	9,484,893,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	-LEVEL 3 - 3,45	11,139,849,900	
1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	84.50	2,497,500	
2						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8,937,790,947	
3						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%	14,400,000	
4						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.11	289,342,500	
5						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	647,161,981	

6						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	584,878,572	
7						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	341,448,400	
8						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik	5%	322,330,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI SAKIP PD	100%	1,488,720,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)	6.89	1,290,350,100	
1						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Jambi	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	20%	1,102,490,100	
2						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Jambi	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%	187,860,000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI RB PD	100%	1,818,825,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	832,800,000	
1						Pendampingan dan Asistensi	Kota Jambi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	70	832,800,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kota Jambi berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Jambi hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus.

BAB
III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kota Jambi menetapkan visi **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi Kota Jambi sebagai berikut:

1. Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kota Jambi yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Inspektorat Kota Jambi melaksanakan misi ke-satu yaitu “Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi” dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kota Jambi ditetapkanlah prioritas dan sasaran yang ingin dicapai seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Inspektorat Kota Jambi

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan
			Indeks Profesionalitas ASN		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)
			Nilai SAKIP		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi
			Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Level Kapabilitas APIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat		

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi yaitu ***"Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel"***. Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan. Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan Inspektorat Kota Jambi

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	4,87

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Kota Jambi

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	100%
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,89
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
		Level Kapabilitas APIP	Level III

Disajikan pula mengenai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	100%
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,89
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
4	Level Kapabilitas APIP	Level III

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, 2 kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan 1 kegiatan pendampingan dan asistensi.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp 13.263.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :

- a. Rp 11.139.849.900,- untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Rp 1.290.350.100,- untuk program penyelenggaraan pengawasan.
- c. Rp 832.800.000,- untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Adapun sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan program/kegiatan/sub kegiatan utama pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Level Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 disertai indikatornya dan prakiraan maju tahun 2024 tersaji pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 (T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Inspektorat Kota Jambi

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana		Sumber	Target	Kebutuhan dana
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM								
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	Inspektorat Kota Jambi	-LEVEL 3 - 3,45	11,139,849,900	APBD Kota Jambi		-LEVEL 3 - 3,45	12,011,888,791
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	Inspektorat Kota Jambi	84.50	2,497,500	APBD Kota Jambi		84.50	2,497,500
	6	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	2 dokumen	1,248,750	APBD Kota Jambi		2 dokumen	1,248,750
	6	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	2 laporan	1,248,750	APBD Kota Jambi		2 laporan	1,248,750
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Inspektorat Kota Jambi	100%	8,937,790,947	APBD Kota Jambi		100%	9,351,535,018
	6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Jambi	65 orang/bulan	8,768,734,947	APBD Kota Jambi		65 orang/bulan	9,182,479,018
	6	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Kota Jambi	12 dokumen	169,056,000	APBD Kota Jambi		12 dokumen	169,056,000
	6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	Inspektorat Kota Jambi	100%	14,400,000	APBD Kota Jambi		100%	14,400,000
	6	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	14,400,000	APBD Kota Jambi		12 laporan	14,400,000
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	72.11	289,342,500	APBD Kota Jambi		72.11	380,000,000
	6	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kota Jambi	-	-	APBD Kota Jambi		-	-
	6	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Kota Jambi	54 orang	232,710,000	APBD Kota Jambi		54 orang	320,000,000
	6	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Jambi	54 orang	56,632,500	APBD Kota Jambi		54 orang	60,000,000
	6	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Jambi	-	-	APBD Kota Jambi		-	-

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana	Sumber		Target	Kebutuhan dana
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	Inspektorat Kota Jambi	70%	647,161,981	APBD Kota Jambi		70%	581,578,509
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	4 paket	15,050,133	APBD Kota Jambi	4 paket	16,323,862
	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	4 paket	77,610,785	APBD Kota Jambi	4 paket	80,000,000
	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	4 paket	15,252,493	APBD Kota Jambi	4 paket	24,427,447
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	4 paket	77,997,480	APBD Kota Jambi	4 paket	77,977,480
	6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	101,491,740	APBD Kota Jambi	12 laporan	34,900,620
	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	359,759,350	APBD Kota Jambi	12 laporan	347,949,100
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	Inspektorat Kota Jambi	70%	584,878,572	APBD Kota Jambi		70%	615,136,364
	6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	1 unit	400,000,000	APBD Kota Jambi	1 unit	400,000,000
	6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	10 unit	15,136,364	APBD Kota Jambi	10 unit	15,136,364
	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	15 unit	169,742,208	APBD Kota Jambi	15 unit	200,000,000
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Jambi	100%	341,448,400	APBD Kota Jambi		100%	418,802,400
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	4,900,000	APBD Kota Jambi	12 laporan	4,900,000
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	128,200,000	APBD Kota Jambi	12 laporan	180,100,000
	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	208,348,400	APBD Kota Jambi	12 laporan	233,802,400
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik	Inspektorat Kota Jambi	5%	322,330,000	APBD Kota Jambi		5%	647,939,000
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Kota Jambi	28 unit	283,880,000	APBD Kota Jambi	28 unit	607,889,000
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Kota Jambi	86 unit	38,450,000	APBD Kota Jambi	86 unit	40,050,000

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Tahun 2024	
								Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana		Sumber	Target
	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Kota Jambi	-	-	APBD Kota Jambi	-	-
	6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Kota Jambi	-	-	APBD Kota Jambi	-	-
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)		6.89	1,290,350,100		6.89	1,883,662,000
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	Inspektorat Kota Jambi	20%	1,102,490,100	APBD Kota Jambi	20%	1,617,862,000
	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	323,700,000	APBD Kota Jambi	12 laporan	461,000,000
	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Jambi	154 laporan	323,700,000	APBD Kota Jambi	154 laporan	461,000,000
	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Jambi	40 laporan	40,500,000	APBD Kota Jambi	40 laporan	56,550,000
	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Jambi	40 laporan	40,500,000	APBD Kota Jambi	40 laporan	56,550,000
	6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat Kota Jambi	1 Kesepakatan	106,190,100	APBD Kota Jambi	1 Kesepakatan	202,962,000
	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Jambi	48 dokumen	267,900,000	APBD Kota Jambi	48 dokumen	379,800,000
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Inspektorat Kota Jambi	100%	187,860,000	APBD Kota Jambi	100%	265,800,000
	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	187,860,000	APBD Kota Jambi	12 laporan	265,800,000
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi		3	832,800,000		3	1,157,825,000
	6	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	Inspektorat Kota Jambi	70	832,800,000	APBD Kota Jambi	70	1,157,825,000
	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	486,500,000	APBD Kota Jambi	40 PD	683,025,000

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Tahun 2024		
							Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana		Sumber	Target	Kebutuhan dana
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	134,400,000	APBD Kota Jambi		40 PD	184,900,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Jambi	24 kegiatan	133,900,000	APBD Kota Jambi		24 kegiatan	189,900,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	78,000,000	APBD Kota Jambi		40 PD	100,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	Inspektorat Kota Jambi	24	189,900,000	APBD Kota Jambi		24	189,900,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan	Inspektorat Kota Jambi	1	100,000,000	APBD Kota Jambi		1	100,000,000
									13,263,000,000				15,053,375,791

BAB **PENUTUP**

Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota ini berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023;
3. Penyusunan Renja Inspektorat ini juga berpedoman pada RKPD Kota Jambi Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Jambi;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif perangkat daerah lainnya dan *stakeholder* terkait.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2023.



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002